

SKRIPSI

BIMO PRASETIO

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
DI INDONESIA
(STUDI KASUS PERTAMINA MELAWAN KARAH BODAS)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
DI INDONESIA
(STUDI KASUS PERTAMINA MELAWAN KARAH BODAS)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.

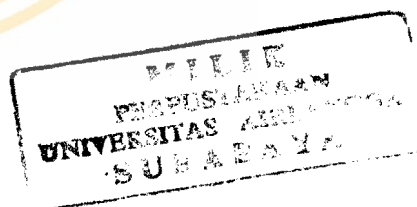
Nip. 131286714

Penyusun



BIMO PRASETIO

Nim. 039914886



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2004

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA

: MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.

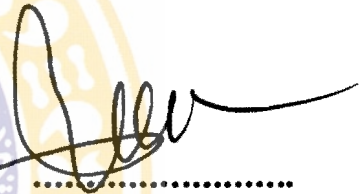


.....

ANGGOTA

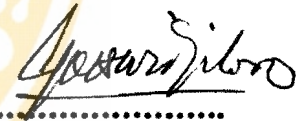
:

1. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.



.....

2. AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H....



.....

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pembatalan, Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York 1958. Pembatalan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan di Indonesia apabila putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional sepanjang putusan tersebut dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia. Dasar pembatalan putusan arbitrase adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang berlaku secara limitatif. Kewenangan pengadilan untuk membatalkan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, tidak boleh masuk ke pokok sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase.
- b. Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang diputus di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia, karena yang berwenang melakukan pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya pengadilan di negara putusan arbitrase dijatuhkan (*country of origin*). Kewenangan yang dimiliki pengadilan Indonesia hanya sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, atau melakukan penolakan bila

putusan arbitrase tersebut tidak sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.

- c. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang privat dan *confidential*, arbitrase hanya akan efektif dan bermanfaat apabila didukung oleh para pihak yang beritikad baik dan bonafide. Apabila para pihak tidak melaksanakan dengan itikad yang baik dan akhirnya membawa sengketa tersebut untuk diselesaikan di pengadilan maka tindakan itu menunjukkan rasa penghormatan yang rendah atas kesepakatan yang telah dibuat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.
- d. Dampak dari pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan terhadap putusan arbitrase internasional yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia akan menimbulkan ketidakpercayaan pihak asing terhadap kepastian hukum di Indonesia. Hal ini tentunya dapat menghambat iklim investasi di Indonesia yang banyak melakukan hubungan dengan pihak asing, bila hal ini terjadi maka akan berdampak pula pertumbuhan ekonomi Indonesia

2. SARAN

- a. Perlu disusun suatu *guideline* (petunjuk) tersendiri oleh Mahkamah Agung mengenai penerapan yang berkaitan dengan pengakuan, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase internasional. Karena MA adalah pengadilan banding tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentunya dengan dukungan, pertimbangan dan pendapat oleh kalangan praktisi dan akademisi yang merupakan pakar dalam arbitrase.
- b. Sudah seharusnya pengadilan memandang lembaga arbitrase sebagai mitra dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak,

mengharuskan pengadilan untuk menahan diri atas pembatasan kewenangannya untuk mencampuri penyelesaian sengketa yang berisi klausula arbitrase.

- c. Para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sudah sepatutnya lebih menghargai penyelesaian sengketa yang bersifat *amicable* (perdamaian) untuk kelangsungan bisnis jangka panjang. Budaya ini harus terus dikembangkan untuk dapat saling menghargai dan meningkatkan hubungan bisnis yang baik dengan pihak asing.

